

AKUNTABILITAS PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* DITINJAU DARI PERSPEKTIF *SHARI'ATE ENTERPRISE THEORY*

Hikmatul Aziziah¹, Khusnul Hidayah S.E S,Ag.,Msi²

¹ Universitas Ahmad Dahlan, ² Dosen Universitas Ahmad Dahlan

Email : ¹ Hikmatulaziziah1@gmail.com

. ABSTRACT

Accountability is one of the most important concepts in organizations and businesses. Without accountability, the existence of a company will be threatened, so the importance of accountability for the company. This study aims to analyze the accountability practiced by Islamic microfinance institutions, namely BMT. SET (Shari'ate Enterprise Theory) provides a comprehensive perspective on accountability. The first dimension of accountability is accountability to God (people to god) and followed by accountability to people (people to people), namely direct and indirect stakeholders. The last dimension of accountability must be directed to the environment (people to environment).

This research is a type of descriptive qualitative research, with data collection through interviews and documentation. Primary data sources came from interviews while secondary data sources came from BMT work program documents. This research which is used as the object of research is BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

The results showed that the most influential accountability practices in BMT BIF were accountability in human relations with humans. Because accountability to humans is done directly and it is a form of accountability to God.

Keywords: *Accountability, shariah entrepreneurship theory, sharia microfinance, BMT.*

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu konsep terpenting dalam organisasi dan bisnis. Tanpa adanya akuntabilitas maka keberadaan suatu perusahaan akan terancam, sehingga pentingnya akuntabilitas bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas yang di praktekkan oleh lembaga keuangan mikro Islam, yaitu BMT. SET (*Shari'ate Enterprise Theory*) memberikan sebuah perspektif yang kompherensif tentang akuntabilitas ini. Dimensi pertama dari akuntabilitas adalah akuntabilitas terhadap Tuhan (*people to god*) dan diikuti dengan akuntabilitas terhadap orang (*people to people*), yaitu *direct* maupun *indirect stakeholder*. Dimensi akuntabilitas yang terakhir harus diarahkan kepada lingkungan (*people to environment*).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari wawancara sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen program kerja BMT. Penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek akuntabilitas di BMT BIF yang paling berpengaruh adalah akuntabilitas dalam hubungan sesama manusia dengan manusia. Karena pertanggungjawaban kepada manusia dilakukan secara langsung dan itu merupakan wujud dari pertanggungjawaban kepada Allah.

Kata kunci : Akuntabilitas, teori kewirausahaan syari'ah, keuangan mikro syari'ah, BMT.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai beberapa lembaga keuangan, dimana salah satunya lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Dalam kegiatannya, Baitul Maal Wat Tamwil terbagi dalam dua sisi kegiatan, yaitu Baitul Tamwil yang menempatkan pengembangan kegiatan-kegiatan investasi dan produktif dengan sarana atau usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk perkembangan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Baitul Maal mengutamakan pada kegiatan-kegiatan kesejahteraan, Bersifat Nirlaba yang diharapkan mampu mengakumulasi dana zakat, infaq dan sadaqah yang pada gilirannya berfungsi untuk mendukung kemungkinan resiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi. .

Mardiasmo (2005:20) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa substansi akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk memberikan penjelasan dan jawaban tentang pelaksanaan tanggung jawab bagi pihak yang mempercayakan tanggung jawab. Dalam perusahaan pentingnya akuntabilitas diterapkan, karena dengan adanya akuntabilitas yang baik di dalam perusahaan maka institusi atau perusahaan tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat. Pada penelitian ini, jenis dari organisasi bisnis dan sosial keagamaan yang menjadi ketertarikan peneliti untuk diteliti adalah jenis lembaga keuangan mikro, yaitu BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Bentuk-bentuk akuntabilitas dapat dikaji dalam berbagai dimensi hubungan akuntabilitas yaitu pada *Shari'ate Enterprise Theory*.

Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan *Enterprise Theory* (ET) yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai islam. Konsep *Enterprise Theory* mengakui adanya

pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas. Berbeda dengan *Entity Theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik (Meutia, 2009:40). *Enterprise Theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah dan masyarakat) . Dengan kata lain, bahwa sebuah perusahaan itu bisa eksis, karena perusahaan tersebut berinteraksi dengan masyarakatnya sebagai konsekuensi kontrak sosial yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat (Triyuwono;2006).

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. LANDASAN TEORI

1. Shari'ate Enterprise Theory

Shari'ate Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori yang mendasari *enterprise theory* sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari penetapan konsep *shari'ate enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders*. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang pemberi amanah. Haryadi (2010:42) menyatakan bahwa pihak yang menerima pendistribusian nilai tambah dalam teori ini di klasifikasikan menjadi dua golongan yakni *direct participants* dan *indirect participant*. *Direct participants* adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan sedangkan *indirect participant* adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan.

2. Akuntabilitas dalam pandangan Shari'ate Enterprise Theory

Shari'ate Enterprise Theory (SET) seperti dijelaskan Triyuwono (2007) memiliki karakter keseimbangan yang menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik serta nilai materi dengan nilai spiritual. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Untuk itu pandangan SET tentang akuntabilitas , menyatakan terdapat tiga dimensi hubungan akuntabilitas. Dimensi

hubungan pertama adalah kepada allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada didunia ini. Maka yang berlaku dalam *Shari'ate Enterprise*

Theory adalah Allah sebagai sumber utama, karena dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Sehingga tujuan dari penggunaan sumberdaya ini tidak lain adalah untuk mendapatkan mardhatillah. Bagaiman tujuan ini dapat dicapai hanya jika si hamba menggunakan dengan cara yang dapat. Menjadikan sumberdaya ini menjadi rahmatan lil alamin. Dimensi hubungan akuntabilitas kedua adalah manusia dengan manusia, di bedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan. Sementara *indirect stakeholders* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non-keuangan, tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Slamet;2001).

3. Akuntabilitas

Roberts dan Scapens (1985) dalam Sinclair (1995) mengatakan bahwa akuntabilitas mensyaratkan sebuah hubungan dimana seseorang diminta untuk menjelaskan dan mengambil tanggungjawab terhadap tindakan mereka. Akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agen*) dan pemilik (*principal*) sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa *agent-principal relationship*. Prinsipal dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada *agent* untuk melakukan aktivitas operasi organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada *principal*.

4. Relasi antara akuntabilitas dan Agency Theory

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari *game theory*, yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak yang lain disebut *principal* (mursalim;2005). *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja

yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama

Pada model *principal agent*, masing-masing tindakan individu diturunkan berdasarkan spesifikasi preferensi dan kepercayaannya. Selanjutnya masing-masing harapan individu terhadap individu lainnya adalah bertindak semata-mata berdasarkan preferensi dan kepercayaannya. Pada umumnya model principal-agen merupakan suatu asumsi hubungan asimetri informasi. Agen diasumsikan mempunyai informasi privat yang tidak dimiliki principal untuk mengakses keuntungan tanpa biaya. Dengan keunggulan informasi privat ini berarti principal akan mematuhi tindakan agen dalam memilih atau menyatakan informasinya. Didalam kondisi demikian pada umumnya diasumsikan, bahwa agen adalah *work-averse* dan *risk averse*.

5. Baitul Maal Wat Tamwil

A. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat (Ridwan, 2004).

Ada beberapa hal penting, mengapa BMT perlu dikembangkan di Indonesia dan diberbagai daerah. Salah satu tujuan didirikannya BMT adalah untuk melayani masyarakat kecil. Meringankan pengusaha pemula dengan menghadirkan system keuangan yang mudah dan tidak memiliki biaya tinggi. Kegagalan pengembangan usaha pada tingkat mikro adalah tingginya suku bunga atas pinjaman modal yang terkadang tidak masuk akal secara ekonomi (Yunus, 2015). Maka, kehadiran BMT dianggap sebagai solusi kondisi tersebut.

B. Status Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Manan (2012) mengatakan bahwa status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

1. BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian , PP RI No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM /X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. BMT yang berstatus hukum koperasi adalah seperti Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT.
2. BMT berstatus hukum Yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
3. BMT yang belum memiliki status hukum, pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk kelompok swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

C. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
2. Mempertinggi kualitas sumber daya manusia anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi tantangan global.
3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

D. Ciri-ciri utama Baitul Maal Wat Tamwil

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.

3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.

4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

E. Prinsip-prinsip utama Baitul Maal Wat Tamwil.

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata

2. Keterpaduan (kaffah) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia

3. Kekeluargaan (kooperatif) .

4. Kebersamaan.

5. Kemandirian.

6. Professionalisme, dan

7. Istiqamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

Setelah

mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah SWT berharap.

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan . Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad mudarabah dari anggota berbentuk:

a. Simpanan biasa

b. Simpanan Pendidikan

c. Simpanan Umrah

d. Simpanan Haji

e. Simpanan Qurban

f. Simpanan Idul Fitri

- g. Simpanan Walimah
 - h. Simpanan akikah
 - i. Simpanan Perumahan (Pembangunan dan perbaikan), dan
 - j. Simpanan kunjungan wisata.
2. Simpanan mudarabah berjangka (semacam deposito 1,3,6,12 bulan) Dengan akad wa'diah (titipan tidak berbagi hasil), diantaranya:
- a. Simpanan yad al-amanah; titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada pihak yang berhak.
 - b. Simpanan yad ad-damanah; giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.
 - c. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
 1. Pembiayaan mudarabah, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 2. Pembiayaan Musyarakah, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
 3. Pembiayaan murabahah, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo
 4. Pembiayaan bay'bi saman ajil, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan
 5. Pembiayaan qard al-hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi
 6. Kebijakan Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwi

METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari wawancara sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen program kerja BMT. Penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PEMAHAMAN BMT BIF MENGENAI AKUNTABILITAS

Berdasarkan hasil penelitian, Pak Saiful selaku Bendahara Umum dan Manajer Cabang Utama di BMT BIF menjelaskan bahwa akuntabilitas pada BMT BIF awalnya hanya sekedar jalan saja menjalankan amanah dari anggota yang menyimpan kemudian disalurkan kepada anggota yang mempunyai usaha dan yang membutuhkan modal. Akan tetapi, BMT BIF tetap bertanggung jawab tentang penggunaan dana dari sumber dana masuk dan keluar, dan beberapa operasional pelaksanaan keberlangsungan BMT Bina Ihsanul Fikri.

“Jadi memang BMT kan berdiri awal itu memang iya sekedar jalan yo kita menjalankan amanah dari anggota yang menyimpan terus kita salurkan kepada anggota yang punya usaha dan butuh modal dan untuk yang lainnya. Itu sebagai intermediasi awalnya, tapi kita harus bertanggungjawab tentang penggunaan dana tersebut dari sumber dana masuk dan dana tersebut keluar dan mungkin beberapa operasional pelaksanaan keberlangsungan daripada BMT BIF tersebut.”

2. Apa saja yang dilakukan BMT terkait akuntabilitas?

Terkait akuntabilitas bahwa BMT Bina Ihsanul Fikri membuat laporan pertanggungjawaban yang sifatnya bulanan dan setiap harinyapun ada rekapan atas transaksi yang terjadi pada hari itu, Sehingga pekerjaan pembukuan Teller selesai pada hari itu juga.

“Terkait akuntabilitas kami BMT BIF tentunya akan membuat semacam laporan pertanggungjawaban itu sifatnya bulanan dan sudah otomatis kita akan close ya tiap bulan laporan dan disetiap harinya pun kita juga ada rekapan yang sifatnya transaksi yang sudah selesai jadi pekerjaan pembukuan teller akan selesai di hari itu juga”

3. AKUNTABILITAS DALAM HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUS

Pak saiful menjelaskan bahwa ada beberapa praktik akuntabilitas yang dilakukan pada BMT BIF kepada hubungan manusia dengan manusia sebagai berikut:

Pada BMT BIF dilaksanakannya pelatihan bagi karyawan untuk mengupgrade seluruh anggota pengelolanya.

“Tentunya untuk dapat menjalankan sebuah pekerjaan yang kitaikan yang pembukuan itukan di syaratkan harus akuntansi ya lulusannya, teller masih fleksibel karena ya bisa pekerjaan teknis, kalau yang marketing juga bebas dari berbagai disiplin ilmu. Tapi yang tidak bisa ditawari yang dari pembukuan itu yang harus dari akuntansi terus dari situkan dari basic keilmuankan mereka sudah ada, tentu kita sebuah lembaga ini kan juga perlu ya mengupgrade seluruh pengelolanya baik itu teller ,pembukuan, marketing, manajer itu secara periodic kita itu. laksanakan pelatihan dan hari sabtu kemarin juga diadakan pelatihan” Ketika ditanya pelatihan seperti apakah yang diadakan BMT BIF, Pak Saiful menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing. Dan berdasarkan Program kerja pada BMT BIF pelatihan yang diadakan seperti; Pelatihan SOM (*Standart Operating Management*) dan SOP (*Standart Operating Prosedure*), pelatihan ini khusus untuk karyawan baru dan bagi calon manajer cabang tujuannya untuk meningkatnya pemahaman karyawan terhadap berbagai peraturan internal BMT BIF dan Program pelatihan Marketing, pelatihan dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga lain yang kompeten di bidangnya untuk meningkatkan kemampuan marketing dalam bidang penjualan, analisa, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan sistem kelompok.

“Tergantung bidangnya masing-masing. Teller seputar teller, juru buku ya juru buku, marketing ya marketing sendiri-sendiri”

Pada nasabah tidak diadakannya pelatihan, namun pihak Marketing memberi tahu dan mengajarkan kepada nasabah tentang pengelolaan keuangan mereka.

“Memang edukasinya tidak secara khususnya incidental saja atau dari sisi pendampingan marketing juga kita juga ada yang sampai kesana seumpama kalau kita pas silaturahmi anggota kan secara khusus semacam private mengajarkan atau memberitahu tentang pengelolaan keuangan mereka pengelolaan usaha mereka anggota tersebut”

Ketika ditanya tujuannya apa, Pak Saiful menjelaskan tujuannya agar pola bagi hasil menjadi lebih jelas.

“Ya tujuannya karena pola bagi hasil kan harus lebih jelas untuk pelaporan keuangan selama ini kan sebelum-sebelumnya dan berdasarkan kira-kira bahkan lebih baik kalo itu memang sudah jelas kejelasan perolehan yang dihasilkan dari dana yang diputar”

Sebagian dana atas laba yang di peroleh BMT BIF dialokasikan ke Panti Asuhan yaitu Panti Asuhan AL-Amin untuk anak-anak SD Sampai dengan anak- anak SMA.

“Tentunya sejak berdiri yang namanya BMT kan sudah seperti itu mbak, BMT untuk sektor yang sifatnya sosial kita itu sudah ada sejak berdiri ini didepannya ada kita mendirikan pantai asuhan Al-Amin untuk anak-anak,SD sampai SMA. Untuk yang sudah kuliah itu gratis,itupun biaya operasionalnya masih belum bisa nutup yak arena biaya operasional perbulan itu 25 juta sedangkan dana masuk rutin itu baru sekitaran 15 juta itu perbulannya”

Untuk menstabilkan keuangan pada BMT dilakukan pendekatan kepada anggota jamaah masjid dan menerima dana dari pemerintah, dana dari semacam pendampingan pemerintah sehingga kepercayaan anggota BMT itu sudah semakin tinggi.

“Programnyakan kita pendekatan keanggota sejak berdiri 96,97 kita memang dana dari anggota jamaah masjid itu kumpul 2.250.000 sampai saat ini, selain dana anggota kita juga menerima dana dari pemerintahan,dana dari semacam pendampingan pemerintah itu sudah sekitar 100 koma sekian atau 110 M lah itu dari sekian tahun sehingga memang kepercayaan anggota terhadap BMT itu sudah semakin tinggi kepercayaannya.

4. AKUNTABILITAS DALAM HUBUNGAN MANUSIA DENGAN LINGKUNGA

Pak saiful menjelaskan bahwa ada beberapa praktik akuntabilitas yang dilakukan pada BMT BIF terhadap lingkungannya sebagai berikut:

Aturan dari pemerintah untuk adanya ruang terbuka hijau pada BMT, Menanam pohon pasca Merapi erupsi pada tahun 2010, Kegiatan rutin memberikan air bersih di Gunung Kidul dan Kegiatan memasang pipanisasi didaerah Krongkong dan Tepus.

“Ooo yaa paling ndak kan aturan dari pemerintah ada ruang terbuka hijau kita penuhi yak arena waktu pendirian kan sempat disuruh pakai aturan untuk mengasih ruang terbuka sesuai aturan kalau yang lingkungan seperti itu. Terus kita juga menanam pohon merapi

pasca erupsi yang 2010 itu juga banyak tanam pohon disana dan kalau yang di gunung kidul kita rutin ya ngasih air bersih untuk lingkungan disana dan kita juga punya dai pesisir dilantai dua disana untuk mencari tau yo semacam apa yang bisa dikerjasamakan dengan BMT karena kemarin kita juga pasang pipanisasi di daerah krongkong, tepus kita juga kemarin nyemblih 6 ekor sapi jadi kita untuk yang di daerah minoritas mines miskin itu kita punya paper ya untuk menjaga aqidah sesama kita, ya jadi kita udah punya semacam, itu kita juga punya beberapa ekor sapi untuk ya jadi mereka informasi-informasi tentang pemberdayaan kita dapat da'I pesisir"

5. AKUNTABILITAS DALAM HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH

Pak saiful menjelaskan bahwa beberapa praktik akuntabilitas yang dilakukan pada BMT BIF terhadap Allah sebagai berikut:

Setiap hari diterapkan semacam kartu kuning untuk diisi, untuk dapat membawa Al-qur'an setiap hari, jika tidak terpenuhi maka gaji tidak akan sampai, Kehadiran jika terlambat 3 menit, 5 menit konsumsi sehari tidak akan dikasih, karena diserahkan ke panti asuhan.

"Di daya kerja itu kan disini ya paling ndak diwajibkan untuk yang laki-laki itu solat di masjid, kalo disini ibu-ibu jam kerja solat tutup ya sebentar untuk melaksanakan solat. Terus setiap hari ada semacam kartu kuning untuk diisi untuk dapat membawa al-qur'an tiap hari, kalau itu tidak terpenuhi maka gaji tidak sampai, terus kehadiran kalau telat 3 menit, 5 menit itu konsumsi sehari tidak dikasihkan, dikasihkan besok di akhirat karena ditaruh ya komitmen dikasihkan kepanti asuhan jadi mereka dapat tapi dikasihkan besok diakhirat

Ketika ditanya apa dampaknya bagi karyawan, pak saiful menjelaskan bahwa dampaknya menjadikan pribadi menjadi disiplin, tertib, terbiasa dengan bangun pagi karena karakter itu berasal dari pembiasaan.

"Iya dampaknya kan, semua itu kan karena pembiasaan, mbaknya biasa bangun pagi, disiplin tertib itu kan semua itu pembiasaan, karakter itu kan dari pembiasaan"

Pada BMT BIF adanya program kerja kajian rutin mingguan dan bulanan serta tadarrus harian tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seluruh pengelola tentang ekonomi islam dan pengetahuan keislaman lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Akuntabilitas dalam hubungan Manusia dengan Manusia

Pada BMT BIF Praktik akuntabilitas dalam hubungan manusia dengan manusia adalah dengan diadakannya beberapa pelatihan untuk meningkatkan kualitas daya kerja karyawan. Sebagian laba yang di peroleh oleh BMT Bina Ihsanul Fikri dialokasikan ke panti asuhan. Nasabah tidak mendapatkan pelatihan hanya penjelasan dari pihak marketing. Untuk menstabilkan keuangan pada BMT dilakukan pendekatan kepada anggota jamaah Masjid dan menerima dana dari pemerintah.

Akuntabilitas dalam hubungan Manusia dengan Lingkungan

Pada BMT BIF Praktik akuntabilitas dalam hubungan manusia dengan lingkungan adalah dengan adanya Aturan dari pemerintah untuk adanya ruang terbuka hijau pada BMT Bina Ihsanul Fikri, Menanam pohon pasca Merapi erupsi pada tahun 2010, Kegiatan rutin memberikan air bersih di Gunung Kidul dan Kegiatan memasang pipanisasi didaerah Krongkong dan Tepus.

Akuntabilitas dalam Hubungan manusia dengan Allah

Pada BMT BIF praktik akuntabilitas dalam hubungan manusia dengan Allah adalah Program kerja BMT mengefektifkan kajian rutin mingguan dan bulanan serta tadarrus harian tujuannya untuk

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seluruh pengelola tentang ekonomi islam dan pengetahuan keislaman lainnya. Setiap hari juga diterapkan semacam kartu kuning untuk diisi sebagai tanda bahwa telah membawa dan membaca Al-qur'an pada hari itu, jika tidak dilaksanakan maka gaji tidak akan sampai sebelum karyawan menyelesaikan pembacaan Al-qur'an tersebut. Kehadiran jika terlambat 3 menit, 5 menit konsumsi sehari tidak akan diberikan kepada karyawan, karena konsumsi tersebut diserahkan kepanti asuhan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada 1 BMT, Sehingga tidak dapat membandingkan bagaimana akuntabilitas ditinjau dari perspektif *Shari'ate Enterprise Theory* di BMT yang lain.
2. Dalam pelaksanaan Penelitian beberapa pertanyaan yang kurang begitu dipahami oleh narasumber sehingga harus dijelaskan secara perlahan.

SARAN

Saran yang dapat diuraikan dari hasil penelitian ini adalah Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian di BMT atau lembaga keuangan syariah yang lain dan bisa menambah ruang lingkup penelitian yang artinya bisa lebih dari 1 BMT atau lembaga keuangan syariah, dengan harapan dapat membandingkan bagaimana Akuntabilitas ditinjau dari perspektif *shari'ate enterprise theory* di BMT yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerieska, Irianto, Affandy. 2012 “*Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau dari Perspektif Shari’ate Enterprise Theory*” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol.2 No.1, Januari 2012:27-39.
- Ismanto. 2015 “*Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan*” *Jurnal Penelitian* Vol.12, No. 1, hal. 24-38.
- Indriantoro, Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
<https://bmt-bif.co.id/>
- Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kalbarini. 2014 “*Implementasi AKuntabilitas dalam Konsep Metamofora Amanah di Lembaga Syariah*” *JESTT* Vol.1 No.7.
- Miles, Huberman. 1994. *Qualitative data analysis, 2nd ed.* USA: Sage Publication.
- Muhammad. 2006 “*Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta*” *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol.7 No. 1, hal:34-55, Januari ISSN:1411-6227.
- Masyithoh. 2014 “*Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil*” Volume V/Edisi 2.

- Murdiana. 2016 “*Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari’ah dalam Bingkai Ius Constituendum*” Jurnal Penelitian, Vol.10,No.2.
- Murwanti, Sholahuddin. 2013 “*Peran Keuangan Ekonomi Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Imogiri*” ISBN:978-979-636-147.
- Novarela, Sari. 2015 “*Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 2,No. 2.
- Purwitasari. 2011 “*Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory*”
- Rusby, Hamzah. 2016 “*Analisa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*” Jurnal Al-Hikmah Vol.13,No.1, ISSN 1412-5382.
- Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Triyuwono. 2006. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.